PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH KABUPATEN LUWU

DIBUAT OLEH :

ALPIANUS

21.023.22.201.041

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ANDI DJEMMA

2 0 2 2

ABSTRACK

Kota Palopo adalah sebuah kota di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota Palopo sebelumnya berstatus kota administratif sejak 1986 dan merupakan bagian dari Kabupaten Luwu yang kemudian berubah menjadi kota pada tahun 2002 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002.

Pada awal berdirinya sebagai kota otonom, Palopo terdiri atas 4 kecamatan dan 20 kelurahan. Kemudian, pada tanggal 28 April 2005, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2005, dilaksanakan pemekaran menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Kota ini memiliki luas wilayah 247,52 km^2[2] dan pada akhir tahun 2020 berpenduduk sebanyak 184.681 jiwa.

Kota Palopo ini dulunya bernama Ware yang dikenal dalam Epik La Galigo. Nama "Palopo" ini diperkirakan mulai digunakan sejak tahun 1604, bersamaan dengan pembangunan Masjid Jami' Tua. Kata "Palopo" ini diambil dari kata bahasa Bugis-Luwu. Artinya yang pertama adalah penganan yang terbuat dari ketan, gula merah, dan santan. Yang kedua berasal dari kata "Palopo'i", yang artinya tancapkan atau masukkan. "Palopo'i" adalah ungkapan yang diucapkan pada saat pemancangan tiang pertama pembangunan Masjid Tua. Dan arti yang ketiga adalah mengatasi.[8] Arti lainnya adalah pohon kemuning (Murraya paniculata), yang mungkin banyak tumbuh di daerah Palopo pada masa lalu.

Palopo dipilih untuk dikembangkan menjadi ibu kota Kesultanan Luwu menggantikan Amassangan di Malangke setelah Islam diterima di Luwu pada abad XVII.[8] Perpindahan ibu kota tersebut diyakini berawal dari perang saudara yang melibatkan dua putera mahkota saat itu. Perang ini dikenal dengan Perang Utara-Selatan. Setelah terjadinya perdamaian, maka ibu kota dipindahkan ke daerahn di antara wilayah utara dan selatan Kesultanan Luwu.[8]

Kota dilengkapi dengan alun-alun di depan istana, dan dibuka pula pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat. Lalebbata menjadi pusat kota kala itu. Dalam kajian M. Irfan Mahmud, pusat kota ini melingkar seluas kurang lebih 10 ha, yang meliputi kampung Amassangan dan Malimongan.

Dalam perkembangannya, maka perlahan-lahan Palopo meluaskan wilayahnya dengan terbukanya kluster kampung tingkat kedua, yakni Surutanga. Luasan wilayah kluster kedua ini sekitar 18 ha, dan diyakini dulunya menjadi pemukiman rakyat dengan aktivitas sosial-ekonomi yang intensif. Menurut penelitian, diduga bahwa Kampung Surutanga ini dihuni hampir semua golongan rakyat. Dengan lokasi yang dekat dengan pantai dan areal persawahan, maka sebagian besar masyarakat Surutanga saat itu bekerja sebagai nelayan dan petani. Pada kontek awal perkembangan Palopo ini, batas kota diyakini berada melingkar antara makam Jera' Surutanga di selatan, makam Malimongan di sisi barat, dan makam raja Lokkoe di utara Sungai Boting.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lahsehingga makalah ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.Adapun Laporan yang berjudul "Perencanaan Prasarana wilayah kabupaten luwu " disusun sebagai syaratuntuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Perencanaan wilayah dan kota yang dibimbing oleh Bapak **Amiruddin akbar fisu** .Tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pegampuh mata kuliah yang telah membantu selama ini. Serta kepada teman-teman yang saling memberikan dukungan sampai saat makalah ini terselesaikan.Dari segala keterbatasan penyusunan laporan ini kiranya dapat dimaklumi sebagai suatu proses pembelajaran ke tahap yang lebih baik, karena disadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih kurang dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk memperbaiki makalah ini kedepannya.Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam pengetahuan kualitas intelektual dalam pemahaman Ilmu Teknik Sipil.

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRACK……..i

KATA PENGANTAR …….ii

DAFTAR ISI…….iii

BAB I

PENDAHULUAN……..……1

1.1 LatarBelakang…...……1

1.2 Rumusan Masalah ……...…….....2

1.3 Tujuan …..…….…….....2

BAB II

TINJAU PUSTAKA ……..……...3

2.1 Literatur terkait dengan infrastruktur wilayah 3

2.2 Teori terkait dengan proyeksi 13

2.2.1 proyeksi penduduk kab luwu 14

2.2.2 Jumlah fasilitas kesehatan menurut jenis dan kecematan di kab luwu.....15

2.2.3 Pendididkan menurut kec di kab luwu.....16

2.2.4 jumlah sarana perdagangan menurut jenis di kab luwu.....17

BAB III

PEMBAHASAN…….……..…19

3.1 Gambaran umum wilayah 19

3.2 Analisis proyeksi jumlah penduduk kab luwu.....24

3.3 Analisis kebutuhan fasilitas kesehatan kab luwu.....26

3.4 Analisis pendidikan kab luwu.....27

3.5 Analisis sarana perdangan kab luwu.....27

BAB IV

PENUTUP.....29.

4.1 Kesimpulan 29

4.2 Saran.....30

DAFTAR PUSTAKA……..…….....31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statisti.

Materi yang merupakan muatan baru dalam UU Nomor 16 Tahun 1997, antara lain :

- Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS.
- Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.
- Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.
- Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut :

- Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder
- Membantu kegiatan statistik di kementrian, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional.

- Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik.
- Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

3.1 Gambaran umum wilayah ?

3.2 Analisis proyeksi jumlah penduduk kab luwu ?

3.3 Analisi kebutuhan fasilitas kesehatan kab luwu ?

3.4 Analisis pendidikan kab luwu ?

3.5 Analisis sarana perdangan kab luwu ?

1.3 Tujuan

- Untuk mengetahui gambaran umum wilayah

- Untuk mengetahui analisis proyeksi penduduk yang ada di kab luwu

- Untuk mengetahui Analisi kebutuhan fasilitas kesehatan kab luwu

- Untuk mengetahui Analisis pendidikan kab luwu

- Untuk mengetahui Analisis sarana perdangan kab luwu

BAB II

TINJAU PUSTAKA

2.1 Literatur terkait dengan infrastruktur wilayah kab luwu

Kabupaten Luwu

adalah sebuah kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo, merupakan hasil pemekaran wilayah Kabupaten Luwu. Saat ini, luas wilayah Kabupaten Luwu dalam data Badan Pusat Statistik 2021, yakni 2.909,08 km², dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2021 jumlah penduduk Kabupaten Luwu sebanyak 365.608 jiwa, dengan kepadatan 126 jiwa/km².[2]

Kabupaten Luwu memindahkan pusat pemerintahan dari Kota Palopo ke kecamatan kota Belopa, sejak tahun 2006, seiring ditetapkannya Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2005, dan diresmikan menjadi ibu kota sejak 13 Februari 2006. Pemekaran Palopo membuat Luwu menjadi salah satu kabupaten/kota di Indonesia yang wilayahnya tidak menyatu.

Letak Geografis

Luas wilayah administrasi Kabupaten Luwu kurang lebih 3.000,25 km2 dan terdiri dari 22 kecamatan pada tahun 2017 yang dibagi menjadi 227 desa/kelurahan. Kecamatan Latimojong adalah kecamatan terluas di Kabupaten Luwu, luas Kecamatan Latimojong tercatat sekitar 467,75 km2 atau sekitar 15,59 persen dari luas Kabupaten Luwu, menyusul kemudian Kecamatan Walenrang Utara dan Walenrang Barat dengan luas masing-masing sekitar 259,77 km2 dan 247,13 km2 atau 8,66 persen dan 8,24 persen. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Belopa
Utara dengan luas kurang lebih 34,73 km2 atau hanya sekitar 1,16 persen.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Luwu dibatasi oleh Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo di sebelah utara, Teluk Bone di sebelah timur, Kota Palopo dan Kabupaten Wajo di sebelah selatan, dan Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang di sebelah barat.

Batas wilayah kabupaten Luwu antara lain;

Utara	Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Tana Toraja
Timur	Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara
Selatan	Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Wajo
Barat	Kabupaten Tana Toraja dan Enrekang

Kabupaten Luwu terdiri dari 22 kecamatan, 20 kelurahan dan 207 desa. Pada tahun 2017, kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.343,97 km² dan jumlah penduduk sebesar 375.535 jiwa dengan sebaran penduduk 112 jiwa/km².[15]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Luwu, adalah sebagai berikut:

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
73.17.04	Bajo	1	11	Desa	Balla Buntu Babang Jambu Langkiddi Pangi Rumaju Saga Sampa Samulang Sumabu

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
					Tallang Bulawang
				Kelurahan	Bajo
73.17.20	Bajo Barat		9	Desa	Bonelemo Bonelemo Barat Bonelemo Utara Kadong-Kadong Marinding Sampeang Saronda Tettekang Tumbu Bara
73.17.01	Basse Sangtempe		12	Desa	Andulan Bolu Buntu Batu Kanna Kanna Utara Lange Ledan Lissaga Mappetajang Sinaji Tabi To'long
73.17.22	Basse Sangtempe Utara		12	Desa	Barana Bonglo Buntu Tallang

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
					Dampan Karatuan Maindo Pantilang Salubua Ta'ba Tasangtongkonan Tede Uraso
73.17.07	Belopa	4	5	Desa	Balubu Belopa Kurrusumanga Pasamai Senga Selatan
				Kelurahan	Balo-Balo Senga Tampumia Radda Tanamanai
73.17.14	Belopa Utara	2	6	Desa	Lamunre Lamunre Tengah Lauwa Lebani Paconne Seppong
				Kelurahan	Pammanu Sabe
73.17.08	Bua	1	14	Desa	Barowa

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
					Bukit Harapan Karang-Karangan Lare-Lare Lengkong Pabbaresseng Padang Kalua Pammesakang Posi Puty Raja Tana Rigella Tiromanda Toddopuli
				Kelurahan	Sakti
73.17.05	Bua Ponrang	1	9	Desa	Balutan Buntu Batu Malenggang Padang Kamburi Padang Ma'bud Padang Tuju Saluinduk Tampumia Tanjong
				Kelurahan	Noling
73.17.13	Kamanre	1	7	Desa	Bunga Eja

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
					Kamanre Libukang Salu Paremang Salu Paremang Selatan Tabbaja Wara
				Kelurahan	Cilallang
73.17.09	Lamasi	1	9	Desa	Awo Gading Padang Kalua Pongsamelung Salujambu Se'pon Setiarejo To'pongo Wiwitan Wiwitan Timur
				Kelurahan	Lamasi
73.17.18	Lamasi Timur		9	Desa	Bulolondong Pelalan Pompengan Pompengan Pantai Pompengan Tengah Pompengan Utara Salupao

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
					Seriti To'lemo
73.17.02	Larompong	1	12	Desa	Bilante Binturu Bukit Sutra Buntu Matabing Buntu Pasik Komba Komba Selatan Lumaring Rante Alang Rantebelu Riwang Riwang Selatan
				Kelurahan	Larompong
73.17.10	Larompong Selatan	1	9	Desa	Babang Batulappa Dadeko Gandang Batu La'loa Malewong Salusana Sampano Temboe
				Kelurahan	Bone Pute

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
73.17.12	Latimojong		12	Desa	Boneposi Buntu Sarek Kadundung Lambanan Pajang Pangi Rante Balla Tabang Tibussan To'barru To'lajuk Ulusalu
73.17.11	Ponrang	2	8	Desa	Buntu Kamiri Buntu Nanna Mario Muladimeng Parekaju Tampa Tirowali Tumale
				Kelurahan	Padang Sappa Padang Subur
73.17.21	Ponrang Selatan	1	12	Desa	Bakti Bassiang Bassiang Timur Buntu Karya Jenne Maeja Lampuara

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
					Olang Paccerakkang Pattedong Selatan Tarramatekkeng To'balo To'bia
				Kelurahan	Pattedong
73.17.03	Suli	1	12	Desa	Botta Buntu Kunyi Cakkeawo Cimpu Cimpu Utara Kasiwiang Lempopacci Malela Murante Padang Lambe Papakaju Towondo
				Kelurahan	Suli
73.17.19	Suli Barat	1	7	Desa	Buntu Barana Kaili Kaladi Darussalam Muhajirin Poringan

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
					Salubua Tallang
				Kelurahan	Lindajang
73.17.06	Walenrang	1	8	Desa	Barammamase Batusitanduk Harapan Kalibamamase Lalong Saragi Tombang Walenrang
				Kelurahan	Bulo
73.17.15	Walenrang Barat		6	Desa	Ilan Batu Ilan Batu Uru Lamasi Hulu Lempe Lempe Pasang Lewandi
73.17.17	Walenrang Timur		8	Desa	Kendekan Lamasi Pantai Pangalli Rantai Damai Seba-Seba Suka Damai Tabah

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
					Tanete
73.17.16	Walenrang Utara	1	10	Desa	Bolong Bosso Timur Buntu Awo Limbong Marabuana Pongko Salulino Salutubu Sangtandung Siteba
				Kelurahan	Bosso
	TOTAL	**20**	**207**		

2.2 Teori terkait dengan proyeksi

Proyeksi penduduk merupakan sebuah perkiraan yang didasari oleh perhitungan ilmiah. Hitung-hitungannya ini dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti kelahiran, kematian, hingga perpindahan penduduk. maka dari itu Kalau mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, kita bisa mengira-ngira jumlah dan struktur usia penduduk di masa depan seperti apa.

2.2.1 proyeksi penduduk kab luwu

PROYEKSI PENDUDUK KABUPATAN LUWU

TAHUN 2017-2021

KECEMATAN	2017	2018	2019	2020	2021
LAROMPONG	20 335,00	20 525,00	20 708,00	20 886,00	21 054,00
LAROMPONG SELATAN	16 078,00	16 150,00	16 216,00	16 277,00	16 330,00
SULI	18 936,00	19 032,00	19 120,00	19 202,00	19 276,00
SULI BARAT	9 108,00	9 188,00	9 265,00	9 339,00	9 409,00
BELOPA	17 121,00	17 378,00	17 629,00	17 879,00	18 123,00
KAMANRE	11 1748,00	11 827,00	11,629,00	11 971,00	12 037,00
BELOPA UTARA	16 666,00	16 904,00	17 138,00	17 368,00	17 591,00
BAJO	15 668,00	15 838,00	16 004,00	16 167,00	16 321,00
BAJO BARAT	10 429,00	10 557,00	10 682,00	10 804,00	10 923,00
BASSESANGTEMPE	7 090,00	7 152,00	7 273,00	7 363,00	7 450,00
LANTIMOJONG	5 576,00	5 603,00	5 628,00	5 650,00	5 671,00
BASSESANGTEMPE UTARA	8 378,00	8 449,00	8 518,00	8 583,00	8 644,00
BUPON	14 425,00	14 506,00	14 583,00	14 654,00	14 718,00
PONRANG	27 100,00	27 264,00	27 419,00	27 566,00	27 700,00
PONRANG SELATAN	24 510,00	24 648,00	24 776,00	24 899,00	25 008,00
BUA	34 873,00	35 321,00	35 759,00	36 191,00	36 607,00
WALENRANG	19 039,00	19 235,00	19 424,00	19 609,00	19 785,00
WALERANG TIMUR	15 422,00	15 582,00	15 734,00	15 885,00	16 027,00
LAMASI	20 777,00	20 885,00	20 983,00	21 077,00	21 160,00
WALENRANG UTARA	18 211,00	18 304,00	18 391,00	18 473,00	18 546,00
WALERANG BARAT	9 455,00	9 531,00	9 603,00	9 673,00	9 739,00
LAMASI TIMUR	12 332,00	12 392,00	12 455,00	12 511,00	12 561,00
KABUPATEN LUWU	353 277,00	356 305,00	359 209,00	362 027,00	364 680,00

2.2.2 Jumlah fasilitas kesehatan menurut jenis dan kecematan di kab luwu

JUMLAH FASILITAS KESEHATAN MENURUT JENIS DAN KECEMATAN DI KAB.LUWU

WILAYAH KECEMATAN	*RUMAH SAKIT*	*RS BERSALIN SWASTA*	*PUSKESMAS*	*PUSTU*	*RS BERSALIN DESA*	*POSKESDES*	*POSYANDU*	*PUSKESMAS KELILING*	*KLINIK*	*PRAKTIK DOKTER/BIDAN*	*APOTIK*
LAROMPONG	-	-	1	8	0	5	-	1	1	1	1
LAROMPONG SELATAN	-	-	1	5	1	10	-	1	0	1	1
SULI	-	-	1	4	1	4	-	1	0	1	4
SULI BARAT	-	-	1	4	1	2	-	1	0	0	0
BELOPA	-	-	1	4	0	1	-	1	1	1	2
KAMANRE	-	-	1	8	2	1	-	1	0	1	0
BELOPA UTARA	2	-	1	5	1	5	-	1	3	0	12
BAJO	-	-	1	4	0	4	-	1	0	1	2
BAJO BARAT	-	-	1	4	3	8	-	1	0	0	0
BASSESANGTEMPE	-	-	1	4	3	5	-	1	0	0	0
LANTIMOJONG	-	-	1	6	0	5	-	1	0	0	0
BASSESANGTEMPE UTARA	-	-	1	4	0	6	-	1	0	0	0
BUPON	-	-	1	5	2	2	-	1	0	0	5
PONRANG	-	-	1	4	1	6	-	1	0	2	0
PONRANG SELATAN	-	-	1	7	3	3	-	1	0	0	2
BUA	-	-	1	7	3	3	-	1	0	1	2
WALENRANG	-	-	1	3	3	2	-	1	0	2	0
WALENRANG TIMUR	-	-	1	5	1	6	-	1	0	0	2
LAMASI	-	-	1	2	3	2	-	1	0	1	0
WALENRANG UTARA	-	-	1	5	0	3	-	1	0	1	0
WALENRANG BARAT	-	-	1	4	0	5	-	1	0	0	0
LAMASI TIMUR	-	-	1	3	0	5	-	1	1	0	0
KABUPATEN LUWU	1	0	22	105	28	91	-	22	6	13	33

2.2.3 Pendididkan menurut kec di kab luwu

KECEMATAN	***NEGERI***		***SWASTA***		***JUMLAH***	
	2017/2021	***2017/2021***	***2017/2021***	***2017/2021***	***2017/2021***	***2017/2021***
LAOMPONG	-	1	15	15	15	16
LAROMPONG SELATAN	-	-	13	13	13	13
SULI	-	-	13	113	13	13
SULI BARAT	-	-	6	6	6	6
BELOPA	-	1	16	17	16	18
KAMANRE	-	-	5	5	5	5
BELOPA UTARA	1	1	8	8	9	9
BAJO	-	-	9	9	9	9
BAJO BARAT	-	-	7	7	7	7
BASSESANGTEMPE	-	-	-	1	-	1
LANTIMOJONG	-	-	6	6	6	6
BASSESANGTEMPE UTARA	-	-	1	1	1	1
BUPON	-	-	9	9	9	9
PONRANG	-	-	17	17	17	17
PONRANG SELATAN	1	-	15	17	16	17
BUA	-	-	16	16	16	16

WALENRANG	-	-	9	9	9	9
WALENRANG TIMUR	-	-	9	9	9	9
LAMASI	-	-	14	14	14	14
WALENRANG UTARA	-	-	12	12	12	12
WALENRANG BARAT	-	-	1	1	1	1
LAMASI TIMUR	-	-	13	13	13	13
KABUPATEN						
LUWU	**2**	**3**	**214**	**218**	**216**	**221**

2.2.4 jumlah saran perdagangan menurut jenis di kab luwu

JUMLAH SARANA PERDAGANGAN MENURUT JENIS DI KABUPATEN LUWU

TAHUN 2017-2021

SARANA PERDAGANGAN	***2017***	***2018***	***2019***	***2020***	***2021***
PASAR	34	35	35	35	36
TOKOH	697	698	755	932	1.127
KIOS	355	356	461	471	480

WARUNG	57	58	81	215	374
TOTAL	***1.143***	***1.147***	***1.332***	***1.653***	***2.017***

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Gambaran umum wilayah

Kabupaten Luwu Dalam Angka 2020 merupakan seri publikasi tahunan yang menyajikan beragam jenis data yang bersumber dari BPS dan Dinas/Instansi lain. Publikasi ini memuat gambaran umum tentang keadaan geografi dan iklim, pemerintahan, serta perkembangan kondisi sosial-demografi dan perekonomian di Kabupaten Luwu. Diharapkan dapat membantu melengkapi penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Luwu.

Secara astronomis Kabupaten Luwu terletak antara 2º34’45’’- 3º30’30’’ Lintang Selatan dan 120º21’15’’ - 121º43’11’’ Bujur Timur, posisi Kabupaten Luwu terletak pada bagian timur laut Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak sekitar 300 km dari Kota Makassar. Kabupaten Luwu terletak diantara Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo di sebelah Utara, Teluk Bone di sebelah timur, Kota Palopo dan kota Wajo di sebelah selatan, Kabupaten Tanah Toraja dan Kabupaten Enrekang di sebelah barat, yang dilihat berdasarkan posisi geografisnya. Daerah Kabupaten Luwu terbagi menjadi dua wilayah yang disebabkan karena adanya pemekaran dari Kota Palopo, yaitu wilaya Kabupatem Luwu bagian selatan dan bagian utara dari Kota Palopo. Kabupatem Luwu memiliki 22 Kecamatan dan 227 Desa/ Kelurahan yang terdiri dari 9 kecamata berbatasan langsung dengan Teluk Bone di sebelah timurnya. Kecamatan yang berbatasan tersebut diantaranya Larompong, Larompong Selatan, Suli, Belopa, Kamanre, Belopa Utara, Ponrang, Ponrang Selatan, dan Bua. Dari 9 kecamatan yang berbatasan dengan Teluk Bone tersebut terdapat sebanyak 37 desa/kelurahan yang diklasifikasikan sebagai daerah pantai, selebihnya sebanyak 190 desa/kelurahan adalah desa/kelurahan bukan pantai.1 Luas wilayah administrasi Kabupaten Luwu kurang lebih 3.000,25 km2 dan terdiri dari 22 kecamatan yang dibagi menjadi 227 desa/kelurahan. Kecamatan 1 Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu , “Kabupaten Luwu Dalam Angka 2020” 44 Latimojong adalah kecamatan terluas di Kabupaten Luwu, luas Kecamatan Latimojong tercatat sekitar 467,75 km2 atau sekitar 15,59 persen dari luas Kabupaten Luwu, menyusul kemudian Kecamatan Walenrang Utara dan Walenrang Barat dengan luas masing-masing sekitar 259,77 km2 dan 247,13 km2 atau 8,66 persen dan 8,24 persen. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Belopa Utara dengan luas kurang lebih 34,73 km2 atau hanya sekitar 1,16 persen. Ibukota Kabupaten Luwu adalah Kecamatan Belopa. Kecamatan yang memiliki jarak

terjauh ke Ibukota Kabupaten Luwu adalah kecamatan Bassesangtempe dengan jarak 110 km, kecamatan Lamasi Timur dengan jarak 96 km, dan kecamatan Walenrang Barat dengan jarak 93 km.2

Kabupaten Luwu
Kabupaten
Lambang
Motto: Luwu Wanua Mappatuo'e Naewai Alena, Toddo Puli Temmalara Te'bakke Tongengnge
 Peta



Kabupaten Luwu

Peta

Tampilkan peta Sulawesi Tampilkan peta Indonesia Tampilkan semua

Koordinat: 3.3483°S 120.2211°E

Negara	Indonesia
Provinsi	Sulawesi Selatan
Tanggal berdiri	4 Juli 1959[1]
Dasar hukum	UU No. 29 Tahun 1959[1]
Hari jadi	23 Januari 1268
Ibu kota	Belopa

Jumlah satuan pemerintahan	tampil **Daftar**
Pemerintahan	
• **Bupati**	Basmin Mattayang
• **Wakil Bupati**	Syukur Bijak
Luas [2]	
• **Total**	2.909,08 km^2 (1,123,20 sq mi)
Populasi (2021)[2]	
• **Total**	365.608
• **Kepadatan**	126/km^2 (330/sq mi)
Demografi	
• **Agama**	Islam 0,5% Kristen 14,6400007% - Protestan 13,47% - Katolik 1,1% Hindu 0,0%
• **Bahasa**	Bahasa Indonesia (resmi) Bahasa Tae' (Luwu) Bahasa Bugis Bahasa Toraja-Sa'dan

• **IPM**	▲ 70,51 (2020) Tinggi[4]
Zona waktu	UTC+08:00 (WITA)
Kode area telepon	0471
Pelat kendaraan	**DP xxxx** F*
Kode Kemendagri	73.17
DAU	Rp 735.958.910.000,- (2020)[5]
Situs web	http://www.luwukab.go.id/



Istana datu Luwu pada masa Hindia Belanda



Pantai Bua, Kabupaten Luwu



Depot BBM Pertamina, Bua. Pantai dangkal mengharuskan BBM dipompa dari kapal tanker di tengah laut



Peta Administrasi Kabupaten Luwu

3.2 Analisis proyeksi jumlah penduduk kab luwu

PROYEKSI PENDUDUK KABUPATAN LUWU

TAHUN 2017-2021

KECEMATAN	2017	2018	2019	2020	2021
LAROMPONG	20 335,00	20 525,00	20 708,00	20 886,00	21 054,00
LAROMPONG SELATAN	16 078,00	16 150,00	16 216,00	16 277,00	16 330,00
SULI	18 936,00	19 032,00	19 120,00	19 202,00	19 276,00
SULI BARAT	9 108,00	9 188,00	9 265,00	9 339,00	9 409,00
BELOPA	17 121,00	17 378,00	17 629,00	17 879,00	18 123,00
KAMANRE	11 1748,00	11 827,00	11,629,00	11 971,00	12 037,00
BELOPA UTARA	16 666,00	16 904,00	17 138,00	17 368,00	17 591,00

BAJO	15 668,00	15 838,00	16 004,00	16 167,00	16 321,00
BAJO BARAT	10 429,00	10 557,00	10 682,00	10 804,00	10 923,00
BASSESANGTEMPE	7 090,00	7 152,00	7 273,00	7 363,00	7 450,00
LANTIMOJONG	5 576,00	5 603,00	5 628,00	5 650,00	5 671,00
BASSESANGTEMPE UTARA	8 378,00	8 449,00	8 518,00	8 583,00	8 644,00
BUPON	14 425,00	14 506,00	14 583,00	14 654,00	14 718,00
PONRANG	27 100,00	27 264,00	27 419,00	27 566,00	27 700,00
PONRANG SELATAN	24 510,00	24 648,00	24 776,00	24 899,00	25 008,00
BUA	34 873,00	35 321,00	35 759,00	36 191,00	36 607,00
WALENRANG	19 039,00	19 235,00	19 424,00	19 609,00	19 785,00
WALERANG TIMUR	15 422,00	15 582,00	15 734,00	15 885,00	16 027,00
LAMASI	20 777,00	20 885,00	20 983,00	21 077,00	21 160,00
WALENRANG UTARA	18 211,00	18 304,00	18 391,00	18 473,00	18 546,00
WALERANG BARAT	9 455,00	9 531,00	9 603,00	9 673,00	9 739,00
LAMASI TIMUR	12 332,00	12 392,00	12 455,00	12 511,00	12 561,00
KABUPATEN LUWU	353 277,00	356 305,00	359 209,00	362 027,00	364 680,00

Nilai ekspor kabupaten luwu pada tahun 2017-2022 meningkat sebesar 1,02 persen bila dibandingkan dengan nilai ekspor pada tahun sebelumnya yakni dari US$ 87 juta menjadi US$ 87,89 juta. Selama tahun 2017-2022 total nilai ekspor kabupaten luwu mencapai US$ 353,40 Juta, Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2016, dimana nilai ekspor Sulawesi Selatan US$ 306,81 Juta, maka telah terjadi peningkatan sebesar 15,19 persen.

3.3 Analisi kebutuhan fasilitas kesehatan kab luwu

Menurut peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang fasilitas pelayanan kesehatan (Kementerian Kesehatan, 2016), fasilitas kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunkan untuk dalam menjalankan upaya pelayanan kesehatan, baik dari segi promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan memiliki 3 tingkatan diantaranya adalah:

1. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dimana berfokus pada pemberian pelayanan kesehatan dasar.

2. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua berfokus pada pemberian pelayanan kesehatan spesialistik.

3. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga berfokus pada pemberian pelayanan kesehatan subspesialistik.

Pada jurnal penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemilihan pelayanan (Ditasari E. et al., 2019), terdapat beberapa faktor yang menjadi penentu pengambilan keputusan masyarakat dalam memilih jasa penyedia layanan kesehatan, beberapa diantaranya adalah biaya atau harga pelayanan, fasilitas pelayanan, fasilitas rumah sakit, dan juga jarak. Terdapat juga faktor dari masyarakat pengguna pelayanan kesehatan itu sendiri, yaitu faktor pendidikan, status sosial ekonomi masyarakat, penghasilan, dan pekerjaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan , yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut,

1) Variabel-variabel yang digunakan untuk menentukan keberadaan fasilitas kesehatan antara lain jumlah penduduk, luas wilayah yang ada di kota Salatiga (masterplan kesehatan kota Salatiga); dan

2) Penelitian ini menjadi alternatif keputusan dalam pengambilan keputusan perancangan pembangunan fasilitas kesehatan kota Salatiga kedepannya dengan memperhatikan faktor luas wilayah dan jumlah penduduk dimana terdapat 4 (empat) kelurahan yang memerlukan fasilitas kesehatan ditandai dengan luas wilayah yang termasuk klasifikasi sedang dan jumlah penduduk tinggi serta luas wilayah sedang dan jumlah penduduk sedang. Saran untuk penelitian ke depan adalah analisis bisa dikembangkan dengan penyebaran rumah sakit, puskesmas dan fasilitas kesehatan lain secara khusus.

3.4 Analisis pendidikan kab luwu

Dinas Pendidikan merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan di daerah. Pendidikan merupakan salah satu layanan dasar yang perlu ditangani secara profesional oleh pemerintah. Banyak sekali pihak-pihak terkait yang memiliki kepentingan yang tinggi berkenaan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di daerah.

Jumlah angkatan kerja yang ada di Kabupaten Luwu sebanyak 159.605 jiwa dimana sebanyak 152.169 penduduk bekerja sedangkan sisanya yaitu sekitar 7.436 penduduk merupakan pengangguran atau dapat dikatakan bahwa 11,79 penduduk usia produktif merupakan pengangguran. Jika dilihat dari pendidikan tertinggi, penduduk yang menganggur paling banyak merupakan lulusan SMA dan Perguruan Tinggi, yaitu sebanyak 3.667 dan 2.686 jiwa.

3.5 Analisis sarana perdangan kab luwu

Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang.

Pada masa modern perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang.

Memenuhi Kebutuhan di Negara Lain. Kerjasama perdagangan internasional dapat membuat negara lain yang tidak memiliki barang maupun jasa yang diinginkan menjadi terpenuhi. Contohnya, Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang mengolah kedelai menjadi tempe, berbeda dengan negara di Eropa maupun Amerika.

Perdagangan beda negara memiliki peranan yang penting dalam kemajuan suatu negara. Pendapatan suatu negara juga akan bertambah banyak ketika perdagangan antar negara ini ditingkatkan secara signifikan. Pengertian perdagangan menurut para ahli merujuk kepada proses jual beli baik barang ataupun jasa dimana penjual dan pembeli merasa saling diuntungkan. Penjual memperoleh laba sedangkan pembeli memperoleh apa yang dibutuhkan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kabupaten Luwu adalah sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan yang dalam kurun waktu tiga tahun dimekarkan menjadi tiga daerah strategis, yaitu Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara yang kemudian dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo. Pemekaran ini turut menjadikan Kota Palopo selaku perintahan otonom kota Palopo. Luas wilayah Kabupaten Luwu 3.000,25 km², sebelum Kota Palopo menjadi kota otonom dengan jarak tempuh dari Kota Makassar lebih dari 367 km.

Peta Kabupaten Luwu



Kabupaten Luwu memindahkan pusat pemerintahan dari kota Palopo ke kota Belopa, sejak tahun 2006, seiring ditetapkannya Belopa sebagai Ibukota Kabupaten Luwu berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2005, dan diresmikan menjadi ibu kota sejak 13

Februari 2006. Kawasan Timur Indonesia maupun pada skala internasional guna melayani negara-negara di kawasan Asia.

Secara astronomi Kabupaten Luwu terletak pada koordinat antara 2°3’45” sampai 3°37’30” LS dan 119°15” sampai 121°43’11” BB, dengan batas administratif sebagai berikut:

- Utara Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Tana Toraja
- Selatan Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Wajo
- Barat Kabupaten Tana Toraja dan Enrekang
- Timur Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara

Kabupaten Luwu memiliki wilayah geografis yang unik karena wilayahnya terbagi dua yang dipisahkan oleh sebuah daerah otonom yakni Kota Palopo, ada pun daerah yang terpisah tersebut adalah wilayah Walenrang dan Lamasi atau yang juga dikenal dengan sebutan WALMAS.

4.2 Saran

Kegiatan pendataan ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang persebaran tinggalan budaya beserta situsnya dengan tujuan kegiatan tersedianya data tentang potensi tinggalan budaya dalam bentuk tertulis di Kabupaten Luwu.

Adapun lingkup kegiatannya meliputi pencatatan temuan di lokasi situs, kondisi lingkungan, pengukuran dan pembuatan gambar denah lokasi, sehingga dapat diketahui bentuk, jumlah temuan, kondisi lingkungan, dan jenis situsnya.

DAFTAR PUSTAKA

https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsulsel/pendataan-cagar-budaya-di-kabupaten-luwu..

https://portal.luwukab.go.id

https://portal.luwukab.go.id/agenda

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palopo

https://palopokota.go.id/page/sejarah

https://palopokota.go.id/page/geografis

https://luwukab.bps.go.id

https://luwukab.bps.go.id/.../kabupaten-luwu-dalam-angka-2021.html

https://luwukab.bps.go.id/publication.html

https://luwukab.bps.go.id/.../kabupaten-luwu-dalam-angka-2018.html

Fisu, A. A. (2018). Analisis Lokasi Pada Perencanaan Terminal Topoyo Mamuju Tengah. PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik, 3(1), 1-12.

Fisu, A. A. (2016). Potensi Demand Terhadap pengembangan Kanal Jongaya & Panampu Sebagai Moda Transportasi (Waterway) di Kota Makassar. Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik, 3(3), 285-298.

Fisu, A. A. (2016). Analisis dan Konsep Perencanaan Kawasan Pelabuhan Kota Penajam Sebagai Pintu Gerbang Kab. Penajam Paser Utara kalimantan Timur. PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik, 1(2), 125-136.

Fisu, A. A. (2019). Merawat Nilai Membangun Kota

Hafid, Z., Fisu, A. A., Humang, W. P., & Natsir, R. (2022). Application of The PPP Scheme on The Tourism-Transportation, Case Study: The Concept Of Palopo City Tourism. PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik, 7(1), 35-52.